

# DUH! RP 4 M UNTUK PLATE DIBUNGKUS KARDUS

Lebih dari satu dasawarsa lalu atau tepatnya tahun 2011, uang suap dibungkus 'kardus durian' menghebohkan masyarakat. Saat itu mencuat dalam kasus Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) di Papua di bawah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Bak dejavu, taktik serupa mencuat kembali. Kini Eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate disebut menerima uang Rp 4 miliar dari Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan pada tahun 2022. Pemberian duit tunai itu dibungkus dengan kardus sebanyak 4 kali. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (27/6/2023) juga terungkap, Plate meminta meminta uang bulanan sebesar Rp 500 juta. Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Anang Achmad Latif sudah mengirimkannya sekitar 20 kali. Plate resmi didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 8,032 triliun dalam proyek penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2020-2022. Duh!

(Baca Hal 11)

## 12 PERBUATAN 'KORUP' PLATE SESUAI DAKWAAN JAKSA:

### 1. Rancang proyek

Pada awal tahun 2020, Plate disebut bertemu dengan Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif dan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak. Pertemuan dilaksanakan di Hotel Grand Hyatt dan di Lapangan Golf Pondok Indah untuk membahas rencana proyek penyediaan BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya.

### 2. Abaikan studi kelayakan

Jaksa menyebut Plate menyetujui perubahan dari 5.052 site desa untuk program BTS 4G tahun 2020-2024 menjadi 7.904 site desa untuk tahun 2021-2022 tanpa melalui studi kelayakan. Selain itu, keputusan Plate ini juga tanpa ada kajian pada dokumen Rencana Bisnis Strategis (RBS) Kominfo maupun BAKTI serta Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Kominfo.

### 3. Kontrak payung

Jaksa menyebut Plate menyetujui penggunaan kontrak payung pada proyek ini dengan tujuan menggabungkan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan operasional atau pemeliharaan.

### 4. Peranak buah

Plate diketahui memeras Achmad Latif yang tak lain anak buahnya sebesar Rp 500 juta setiap bulannya. Pemberian uang berlangsung sejak Maret 2021 hingga Oktober 2022. Ironisnya, uang yang diterima Plate justru bersumber dari perusahaan konsorsium proyek ini.

### 5. Keluarkan Perintah

Jaksa mengungkapkan Plate memerintahkan Achmad Latif agar pekerjaan power system meliputi battery dan solar panel dalam proyek ini diberikan kepada Direktur Utama PT Basis Utama Prima, Muhammad Yusrizki Muliawan.

Grafis bersambung ke hal 11...

### DUGAAN ALTRAN KORUPSI PLATE



JUNI 2021  
**RP 250.000.000**

Kepada Gereja GMIT di Provinsi Nusa Tenggara Timur;



MARET 2022  
**RP 500.000.000**

Kepada Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus



MARET 2022  
**RP 1.000.000.000**

kepada Keuskupan Dioses Kupang.

**Government (Hal2)  
Harga Pangan  
Diklaim Naik Wajar,  
Menkeu Tetap  
Waspada**

...  
Diberitahukan kepada pembaca setia, Kamis (29/6/2023) Koran Lentera Today tidak terbit terkait libur Hari Raya Idul Adha 2023. Terbit kembali pada Senin (3/7/2023). Update berita bisa terus dinikmati melalui www.lenteratoday.com.

# Harga Pangan Diklaim Naik Wajar, Menkeu Tetap Waspada

**JAKARTA**-Mayoritas harga pangan terpantau landai jelang Hari Raya Iduladha 2023, kecuali cabai-cabaian dan komoditas daging. Meski demikian, secara jangka panjang Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mewaspadaai gejolaknya karena bisa memicu inflasi hingga mengganggu perekonomian Indonesia.

"Harga pangan masih mengalami gejolak dan ketidakpastian. Ini menimbulkan dampak terhadap pemulihan dan pelemahan ekonomi dunia. Di satu sisi, lonjakan harga menyebabkan inflasi, di sisi lain menimbulkan pelemahan ekonomi, baik di negara maju dan berkembang," ungkapnya dikutip Selasa (27/6/2023).

Ani mengatakan inflasi masih menjadi 'hantu' bagi negara-negara di dunia. Bahkan, ia mencontohkan AS dan Eropa yang masih berketat dengan kenaikan suku bunga untuk meredam inflasi. Menurutnya, kenaikan suku bunga di kawasan Eropa meski mereka masih di bawah tingkat inflasi sudah cukup menggoyahkan perekonomian dunia.

Oleh karena itu, ia mewanti-wanti Indonesia untuk terus waspada terhadap gejolak harga pangan yang bisa memicu inflasi. "Kita perlu mewaspadaai situasi global ini di semester II, di mana di negara maju akibat kenaikan suku bunga yang tinggi membuat pertumbuhan ekonomi mereka melemah," pesan Ani. "Di emerging country, Amerika Latin, Brasil, Meksiko suku bunga melonjak tinggi. Memang, (suku bunga) bisa menjinakkan inflasi, tapi juga memukul perekonomian," tandasnya.

Soal harga pangan, per Selasa (26/7/2023) tercatat harga cabai naik gila-gilaan jelang Iduladha yang akan berlangsung Kamis (29/6/2023) mendatang. Berdasarkan Panel Harga milik Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga cabai rawit merah di pedagang eceran naik drastis 23,25 persen alias Rp9.440. Jika hari sebelumnya masih dibanderol Rp40.600 per kg, sekarang sudah tembus Rp50.040 per kg.

Tak beda jauh, harga cabai merah keriting pun naik 18,65 persen menjadi Rp42.750 per kg dibandingkan hari sebelumnya sebesar Rp36.030 per kg. Dengan kata lain, harga cabai merah keriting naik Rp6.720. Meski begitu, inflasi inti tahunan Indonesia per Mei 2023 masih berada di angka 2,66 persen year on year (yoy). Angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi bulan sebelumnya sebesar 2,83 persen yoy.

## Daging Ayam Tembus Rp 50 Ribu

Di sisi lain, harga daging ayam terpantau terus melonjak, bahkan



Jelang Iduladha 2023, harga daging ayam menjadi salah satu komoditas pangan yang naik cukup tajam. (ilustrasi.dok)

sampai sentuh Rp50.000 per kg. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi pun melakukan pengecekan harga di pasar tradisional.

Dia membenarkan, ada lonjakan harga daging ayam di pasar. Namun, dia menambahkan, lonjakan harga ayam yang mencapai Rp 50 ribu itu adalah harga daging ayam fillet. "Hari ini kita bersama teman-teman Pasar Jaya cek langsung di Pasar Palmerah, untuk harga ayam Rp50.000 per kilogram (kg) itu harga ayam fillet. Jadi ini mesti diluruskan, fillet itu boneless, berbeda dengan karkas," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (27/6/2023).

"Sedangkan untuk harga ayam karkas dengan bobot 1,3-1,4 kg harganya Rp43.000-Rp44.000. Jadi kalau di-convert harganya kurang lebih masih sekitar Rp 36.000 per kg dan itu masih harga wajar," jelas Arief.

Di sisi lain, Arief menjelaskan, memang selalu ada potensi kenaikan harga menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) seperti Iduladha. Yang disebabkan meningkatnya permintaan. "Kalau dalam H-2 Lebaran biasanya kenaikan sampai dengan 5-10 % masih bisa ditolerir, tapi kalau sampai ke Rp50.000 per Kg itu angka yang tidak bisa ditolerir. Setelah kita cek dan pastikan ternyata itu harga untuk ayam fillet," jelasnya.

Sebelumnya, harga daging ayam yang mahal jadi sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) harga sembako di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. "Yang naik agak tinggi daging ayam. Biasanya di harga Rp30.000-32.000, ini sudah mencapai Rp50.000. Tadi saya cek dan memang ada problem di pasokannya," ujar Jokowi saat meninjau Pasar Palmerah pada hari Senin (26/6/2023).

Terpisah, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan kolaborasi menjadi kunci sukses dalam mengendalikan pangan. Menurutnya, diperlukan kolaborasi seluruh pihak untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, khususnya menjelang

IdulAdha 2023.

"Seluruh pemangku kepentingan terkait mendukung Bapanas mengadakan Gerakan Pangan Murah di seluruh Tanah Air. Kunci keberhasilan

pengendalian stok dan harga pangan tentunya karena kolaborasi seluruh pihak terkait," ujar Zulkifli dalam keterangan tertulis, Selasa (27/6/2023).

Dalam kesempatan ini, pria yang akrab disapa Zulhas ini mengapresiasi Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang telah meluncurkan Gerakan Pangan Murah secara serentak di seluruh Indonesia. Ia mengatakan pihaknya pun akan mendukung gerakan tersebut.

"Melalui Gerakan Pangan Murah, Bapanas dapat memperpendek rantai distribusi sehingga rakyat mendapatkan harga terbaik. Melalui Bapanas, pemerintah bisa mengendalikan stok pangan. Lahirnya Bapanas untuk mengendalikan pangan. Untuk itu, kita dukung agar Bapanas sukses," kata Zulhas. (wid,rls,ist,ant/dya)

## HARGA RATA RATA PANGAN SERTA PERUBAHANNYA (27 JUNI 2023)

### DAGING AYAM RAS SEGAR

Rp 40.400 per kg  
↑ 0,37% - Rp 150

### DAGING SAPI KUALITAS 2

Rp 130.050 per kg  
↑ 0,27% - Rp 350

### CABAI MERAH KERITING

Rp 48.000 per kg  
↑ 1,48% - Rp 700

### CABAI RAWIT HIJAU

Rp 40.700 per kg  
↑ 0,62% - Rp 250

### DAGING SAPI KUALITAS 1

Rp 139.500 per kg  
↑ 0,4% - Rp 550

### BAWANG PUTIH UKURAN SEDANG

Rp 39.450 per kg  
↓ 0,13% - Rp 50

### CABAI MERAH BESAR

Rp 49.300 per kg  
↓ 0,3% - Rp 150

### CABAI RAWIT MERAH

Rp 49.050 per kg  
↓ 1,7% - Rp 850

### MINYAK GORENG KEMASAN BERMEREK 1

Rp 21.350 per kg  
↓ 0,7% - Rp 150

### MINYAK GORENG KEMASAN BERMEREK 2

Rp 19.900 per kg  
↓ 0,25% - Rp 50

### GULA PASIR KUALITAS PREMIUM

Rp 16.000 per kg  
↓ 0,31% - Rp 50

### GULA PASIR LOKAL

Rp 14.700 per kg  
↓ 0,34% - Rp 50



# Geregetan Ditanya RUU Perampasan Aset, Jokowi Sentil DPR



Presiden Joko Widodo

**JAKARTA** - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan nasib pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset berada di tangan parlemen. Di mana Surat Presiden tentang Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset juga sudah dikirimkan ke DPR.

"Saya itu sudah mendorong tidak sekali dua kali, sekarang itu posisinya ada di DPR," kata Jokowi di Pidie, Aceh, Selasa (27/6/2023). Sehingga ia meminta kepada masyarakat untuk mendorong pihak DPR untuk melakukan pembahasan. "Masa saya ulang-ulang terus, sudah di DPR sekarang, dorong saja di sana," kata Jokowi.

Sebelumnya pihak Istana juga sudah mengkonfirmasi penyerahan Surpres itu kepada parlemen. "Benar, sudah ditandatangani hari Jumat (5/5/2023) dan langsung diserahkan ke DPR dan sudah diterima pada Jumat. Diterima sekretariat DPR," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin kepada wartawan, Senin (8/5/2023).

Begitu juga dengan DPR mengkonfirmasi bahwa Surpres tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sudah diterima. "Iya betul DPR sudah menerima surpres tersebut tanggal 4 Mei. Sekarang ini DPR masih dalam kegiatan reses dan pembukaan masa sidang pada tanggal 16 Mei," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar, mengutip Detikcom, Senin (8/5/2023).

Indra mengatakan, pembahasan surpres RUU Perampasan Aset dilakukan setelah pembukaan masa sidang DPR. Pembahasannya dimulai dari Rapat Pimpinan (Rapim) sebelum dibawa ke rapat Badan Musyawarah (Bamus).

Diharapkan, melalui RUU perampasan aset ini, bisa memperkuat dalam menindak kasus korupsi yang cukup sulit saat ini dan bisa menjadi 'senjata' bagi aparat penegak hukum. Aset-aset hasil tindak pidana bisa langsung dirampas negara saat keputusan hasil tingkat pertama, yaitu pengadilan negeri. Setelah itu, tidak diberikan kewenangan untuk digugat.

"Prinsipnya bisa memotong waktu proses perampasan asetnya, di draf RUU 2015 kalau nggak salah prosesnya final di tingkat pertama saja, enggak bisa dibanding, enggak bisa dikasasi, pokoknya ga ada upaya hukumnya," kata Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Laola Ester Kaban.

## DPR Belum Sepakat

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi atau Awiek mengatakan surpres RUU Perampasan Aset masih ada di tataran pimpinan DPR. Dengan demikian, dia ogah berkomentar banyak soal perkembangan RUU tersebut di DPR. "Masih di pimpinan," kata Awiek kepada wartawan, Selasa (27/6/2023).

Awiek menyebutkan pimpinan DPR juga belum menjadwalkan rapat Badan Musyawarah (Bamus) bersama Baleg DPR. Perlu diketahui, rapat Bamus digelar pimpinan DPR untuk menunjuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR yang nantinya membahas suatu RUU. "Belum ada (Bamus)," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus mengungkapkan, terhambatnya pembacaan surat presiden (surpres) RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna disebabkan proses politik yang belum tuntas di antara fraksi-fraksi parpol

parlemen. "Itu kan ada proses secara politik di antarfraksi, itu kan masih berjalan gitu loh. Sehingga mereka setelah bulat, baru sampai ke kami-kami pimpinan itu," ucap dia di Kompleks Parlemen, Senayan.

Adapun, Ketua DPR Puan Maharani menyadari bahwa kehadiran RUU Perampasan Aset genting. Kendati demikian, pihaknya mengaku perlu mencermati masukan masyarakat sebelum akhirnya RUU Perampasan Aset dibacakan di rapat paripurna. "Namun, juga masukan dan tanggapan dari masyarakat, kemudian hal-hal lain yang harus kami cermati juga itu menjadi sangat penting," ujar Puan.

Ia meminta semua pihak untuk bersabar. Puan tak ingin proses pembahasan dilakukan secara tergesa-gesa. Sementara itu, fraksi di DPR memilih saling tunggu. Salah satunya adalah Fraksi PAN. Sementara fraksi-fraksi

lainnya memilih tak berkomentar soal kelanjutan nasib pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR.

Seperti diketahui, RUU Perampasan Aset memungkinkan penegak hukum untuk merampas aset tersangka saat penyidikan berlangsung. Sementara itu, RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal akan menyulitkan proses pencucian uang.

Sejak 2021, Jokowi meminta dewan mempercepat pembahasan aturan perampasan aset. Ia awalnya menargetkan RUU Perampasan Aset rampung pada 2022, namun hingga tahun ini payung hukum tersebut belum rampung. RUU Perampasan Aset Tindak Pidana ramai dibicarakan pasca munculnya dugaan transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan. Adapun, pemerintah telah menyerahkan draf RUU tersebut ke DPR pada Mei 2023.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta agar DPR segera mengesahkan aturan tersebut. Pernyataan itu ia sampaikan saat rapat bersama di Komisi III DPR RI pada 29 Maret 2023. (wid,rls, ist/dya)

**Dewan Pengurus Wilayah  
PAN Provinsi Jawa Timur**

*Mengucapkan*

**SELAMAT MERAYAKAN  
HARI RAYA  
IDULADHA**

1444 H/2023

**DEVI CANDRA FEBRIANA**  
CALEG DPRD KAB. BULITAN DARUL I.

**H. RAHMAT SANTOSO, SH. MH**  
WAKIL KETUA DPW PAN JAWA TIMUR

**VENINA PUSPASARI**  
CALEG DPRD PROV. JATIM DARUL I.

**Amanat Jatim** **pan\_jatim** **www.amanat.news**



# 'Borok' Korupsi KPK Terkuak Lagi Pegawai Tilap Uang Dinas Rp 550 Juta

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan ada salah satu pegawai di bidang administrasi yang diduga memotong anggaran perjalanan dinas pegawai KPK lainnya. Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya H. Harefa mengatakan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) ini diungkap oleh atasan dan tim kerja oknum tersebut.

Cahya menjelaskan adanya keluhan dari pegawai KPK lain mengenai proses administrasi yang berlarut dan terjadinya pemotongan uang dinas. "Dengan keluhan adanya proses administrasi yang berlarut dan potongan uang perjalanan dinas yang dilakukan oleh oknum tersebut kepada pegawai KPK yang melaksanakan tugas perjalanan dinas," ujar Cahya dalam konferensi pers di Gedung Juang KPK, Jakarta, Selasa (27/6/2023).

Ia menjelaskan atasan dan pegawai KPK lantas melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Inspektoral KPK yang bertugas mengawasi internal lembaga. Lalu, Inspektoral melakukan pemeriksaan dan menghitung dugaan korupsi dengan berbentuk kerugian keuangan negara. "Dugaan kerugian keuangan negara dengan nilai Rp 550 juta dengan kurun waktu tahun 2021-2022," jelas Cahya.

Berbekal bukti permulaan tersebut, jelas dia, pejabat pembina mengadakan dugaan pemotongan anggaran dinas itu ke Kedepuitan bidang Penindakan dan Eksekusi KPK. Tak hanya itu, Sekjen KPK juga bakal melaporkan perbuatan oknum itu ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. "Bersamaan dengan proses tersebut oknum sudah dibastugaskan untuk memudahkan proses pemeriksaannya," imbuh dia.

"Oknum tersebut sudah dibebaskan tugas untuk memudahkan proses pemeriksaannya," kata Cahya H Harefa di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (26/6/2023).

Cahya mengatakan pelaku saat ini tengah menjalani pemeriksaan disiplin pegawai di Inspektoral KPK. Perbuatan pelaku juga nantinya akan dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. "Dari kami sudah menyampaikan hal ini kepada Kedepuitan Penindakan dan Eksekusi, dan juga nanti kita akan laporkan ke Dewan Pengawas," katanya

Belakangan, lembaga antirasuah tengah disoroti perihal temuan Dewan Pengawas (Dewas) soal pungli di rutan KPK yang jumlahnya mencapai Rp4 miliar pada periode Desember 2021-Maret 2022. Anggota Dewas KPK Albertina Ho menyebut pungutan liar tersebut terhadap para tahanan di rutan KPK. Sejumlah bentuk pungutan liar berupa setoran tunai hingga transaksi yang melibatkan rekening pihak ketiga. Wakil KPK Alexander Marwata menyebut pihaknya mencopot puluhan pegawai rutan dari

jabatannya terkait kasus pungli di rutan KPK.

## Pelemahan dari Dalam

Rentetan pelanggaran di tubuh KPK dianggap sebagai wujud pelemahan terstruktur terhadap lembaga itu. Dalam beberapa waktu belakangan informasi tentang pelanggaran di tubuh lembaga antikorupsi itu mulai terungkap. Mulai dari dugaan pungutan liar di rumah tahanan, dugaan perselingkuhan penjaga rutan dengan istri tahanan, sampai yang terakhir soal dugaan pemotongan uang dinas pegawai.

Mantan penasihat KPK, Abdullah Hehamahua, merasa kecewa atas berbagai pelanggaran internal di lembaga yang pernah menjadi tempatnya mengabdikan. Menurut Abdullah ada perencanaan yang sistematis buat melemahkan KPK dari dalam, mulai dari pemilihan sosok Firli Bahuri sebagai Ketua KPK yang kontroversial sampai pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) yang justru dianggap kurang bertaji menindas sejumlah pelanggaran itu.

"Semua ulah Firli dan Dewas diduga untuk menciptakan image negatif di masyarakat terhadap KPK sehingga muncul tuntutan pembubaran KPK," kata Abdulla, Selasa (27/6/2023). Menurut Abdullah, jika kondisi itu dibiarkan terjadi maka KPK yang menjadi salah satu ujung tombak pemberantasan korupsi tidak lagi dipercaya dan disepelekan oleh masyarakat.

"Alasannya, KPK sama saja dengan Kepolisian dan Kejaksaan sehingga untuk apa dikeluarkan anggaran yang besar kalau kinerjanya jelek," ucap Abdullah.

Menurut Abdullah, pelanggaran di internal KPK yang marak juga dampak dari ulah para pimpinannya yang tidak memberikan contoh perilaku teladan. Ketua KPK, Firli sudah pernah dinyatakan bersalah oleh Majelis Kode Etik KPK. Kesalahan Firli saat menjabat Deputi Penindakan KPK karena menjemput saksi yang hendak diperiksa, yakni Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah.

Meskipun Firli menganggap tindakan itu wajar karena BPK adalah mitra kerja KPK, pada 2019, ia dinyatakan melanggar kode etik terkait hal ini. Kasus lainnya adalah saat Firli yang masih berstatus Deputi Penindakan KPK bertemu dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat, M. Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang pada 2018. Padahal saat itu KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan Pemprov NTB.

"Sewaktu Firli lolos seleksi pimpinan KPK di Pansel, pimpinan KPK kirim surat resmi ke pimpinan DPR, khususnya pimpinan Komisi 3 DPR, yang menginformasikan bahwa



Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya H. Harefa

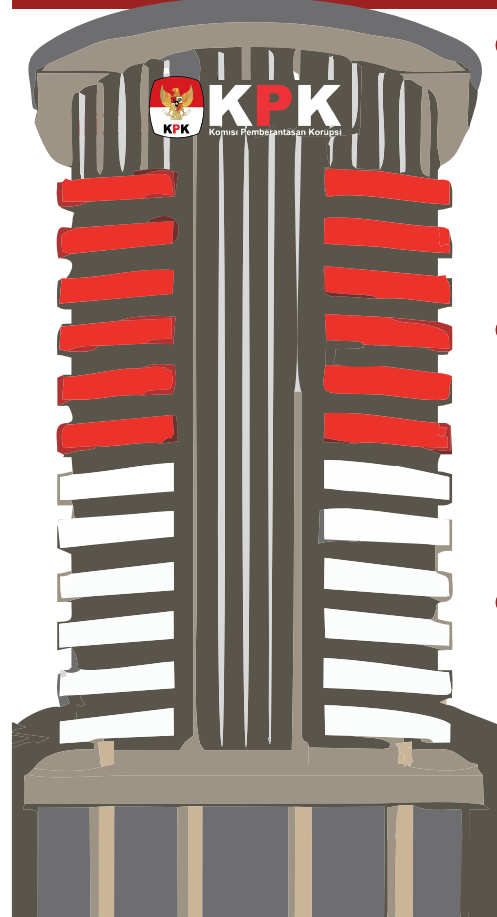
Firli bermasalah karena melanggar kode etik KPK. Faktanya, semua anggota komisi 3 pilih Firli sebagai Ketua KPK," ujar Abdullah.

Indikasi kedua perusakan KPK dari dalam, kata Abdullah, adalah muncul asumsi Firli sengaja merekrut pegawai yang berpotensi bermasalah. "Hal tersebut dilakukan dengan cara merekrut pegawai yang tidak berintegritas sehingga mudah melakukan pelanggaran kode etik baik berupa suap maupun pelecehan seksual," lanjut Abdullah.

Selain itu, Abdullah juga

mengkritik sikap Dewas KPK yang seolah tumpul meski diisi oleh tokoh-tokoh yang dinilai mempunyai kapasitas integritas yang tinggi. Dewas KPK saat ini dipimpin oleh Tumpak Hatorangan Panggabean sebagai ketua, serta Albertina Ho, Indriyanto Seno Adji, Syamsudin Haris, dan Harjono. "Dewas tidak tegas dalam memberikan sanksi terhadap pegawai karena Dewas diangkat oleh Presiden sehingga tidak bisa melakukan tindakan yang bertentangan dengan keinginan Istana," ucap Abdullah. (wid,rls,ant/dya)

## DERETAN MASALAH MEMBELIT KPK



### PUNGLI RUTAN

Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Albertina Ho yang membeberkan temuannya ini dalam konferensi pers pada Senin, 19 Juni 2023. Albertina mengklaim bila pengungkapan hal ini dilakukan Dewas KPK tanpa adanya pengaduan yang diterima. Untuk itu, persoalan dugaan pungli ini disebut Albertina diserahkan ke KPK sejak 16 Mei 2023 tapi KPK sendiri belum pernah sekali-pun menyampaikan hal ini ke publik. Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 total pungli sejumlah Rp 4 miliar.

### TINDAK ASUSILA KE ISTRI TAHANAN

Kasus selanjutnya yakni pelecehan terhadap istri tahanan. Adapun kasus ini diungkap ke publik oleh mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan lewat cuitannya. Kasus pelecehan ini masih satu rangkaian dengan kasus pungutan liar di rutan KPK. Novel mengatakan kasus pungutan liar atau pungli di rumah tahanan (rutan) KPK berawal dari adanya laporan pelecehan istri tahanan. Pelecehan itu diduga dilakukan oleh pegawai di Rutan KPK.

### TILAP DUIT RP 500 JUTA

Terbaru, ada kasus dugaan korupsi uang perjalanan dinas. Satu pegawai di bidang administrasi KPK diduga menyelewengkan uang perjalanan dinas. Dugaan korupsi yang dilakukan pegawai KPK itu berupa pemotongan uang perjalanan dinas. Kasus ini terungkap setelah pimpinan pelaku melapor ke Inspektoral KPK. Hasil pemeriksaan awal dugaan korupsi itu terjadi pada periode 2021-2022. Pemotongan uang dinas yang dilakukan pelaku mencapai Rp 550 juta.

# Akankah Kereta Cepat Berlanjut ke Surabaya?

**SURABAYA** – Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) apakah akan benar benar berlanjut ke Surabaya? Rencana ini terus bergulir setelah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menjajal KCJB beberapa hari lalu.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, merespons rencana KCJB akan berlanjut ke Surabaya. Menurut Bhima, yang jelas perpanjangan jalur kereta cepat ke Surabaya harus benar-benar dipikirkan skemanya jangan seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung. "Nanti akan berdampak juga pada pembengkakan biaya," ujarnya dikutip dari tempo.co, Selasa (27/6/2023).

Dia menandakan, bunga utang yang diberikan cukup mahal sehingga rencana harus benar benar matang. Sebab nantinya yang menanggung adalah pihak konsorsium. "Jadi harus dilakukan perencanaan kalau ingin memajukan sampai ke Surabaya," tutur Bhima.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir juga yang mengatakan bahwa pemerintah akan melanjutkan KCJB sampai Surabaya. "Wacana ini telah saya sampaikan ke presiden dan dia juga memiliki pandangan yang sama," ujarnya sebagaimana pernah diberitakan tempo.co.

Hal serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan melapor ke Presiden Joko Widodo alias Jokowi setelah menjajal KCJB. "Nanti akan kami laporkan ke presiden, preliminary study untuk Bandung sampai ke Surabaya," ujar dia.

Luhut bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan beberapa pejabat lainnya menjajal KCJB. Luhut mencoba dari Stasiun Halim hingga ke Stasiun Padalarang, kemudian dari Stasiun Tegalluar menggunakan kereta feeder, lalu kembali lagi ke Stasiun Halim.

Dia juga mengatakan bahwa dalam proyek ini akan banyak penghematan yang dilakukan, karena adanya hilirisasi membuat banyak material yang tidak perlu impor dan hanya berasal dari dalam negeri.

"Saya kira ini akan membuat terobosan-terobosan baru di republik ini. Jadi membuat kita bisa nanti mengikuti Cina juga dari belakang, karena mereka sudah jauh lebih maju dari kita. Tapi mereka ingin share juga teknologinya pada kita," ucap Luhut.

Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Aditya Dwi Laksana, juga menanggapi rencana kereta cepat

berlanjut ke Surabaya. "Jakarta Bandung saja berdarah-darah bagaimana kalau nanti mau diperpanjang sampai Surabaya, pasti jauh lebih berdarah-darah," ujar Aditya.

Menurut Aditya, yang perlu diperhitungkan itu adalah kemampuan Indonesia dalam membangun kereta cepat hingga ke Surabaya. Mulai dari permintaan, kebutuhan, kondisi ekonomi makronya, produk domestik bruto (PDB), pergerakan mobilitas masyarakatnya, tata ruangnya, hingga komposisi modelnya seperti apa.

Selain itu, kata dia, pemrintah juga saat ini gencar membangun jalan tol hingga bandara kecil di wilayah Jawa. Jika nanti membangun juga kereta cepat ke Surabaya, Aditya mempertanyakan soal optimalisasi penggunaan sepur kilat itu.

"Pemikirannya harus cermat dan panjang. Tapi memang Jakarta-Bandung sebetulnya tidak efektif kalau melayani hanya di daerah itu," tutur Aditya. Karena hanya beroperasi dengan jarak 142 kilometer. Pertanyaannya kenapa? Karena satu kecepatan maksimal itu sulit ditempuh karena kalau itu harus berhenti di beberapa stasiun."

Selain itu, jika hanya Jakarta-Bandung efek terhadap memunculkan wilayah pertumbuhan ekonomi baru hanya mengikuti seberapa jarak jalurnya. Sebetulnya, kata Aditya, kereta cepat yang kompetitif itu yang jaraknya antara 200-800 kilometer.

Menurut dia, jika jaraknya di bawah 200 kilometer, masih bersaing dengan kendaraan transportasi darat berbasis jalan tol. Sementara, jika jaraknya di atas 800 kilometer, akan kalah bersaing dengan moda transportasi udara, pesawat.

Meskipun begitu, menurut Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), mengatakan bahwa biaya proyek kereta cepat hingga Surabaya dapat mencapai 5-7 kali lipat KCJB.

Selain biaya yang berkali lipat dengan KCJB, proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya juga bergantung kepada pemerintah setelah era Presiden Jokowi. Kekhawatiran tidak lanjutnya wacana ini disampaikan oleh Erick Thohir yang mengatakan bahwa saat ini tidak ada semacam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dapat memastikan keberlanjutan proyek pembangunan setelah suatu periode pemerintahan berakhir.

Sementara itu, panjang rel kereta cepat Jakarta-Surabaya diperkirakan akan sama dengan panjangnya jalur Kereta Api Jakarta-Surabaya saat ini, yakni kurang lebih sejauh 720 km. Meskipun diperkirakan berjarak sama, namun waktu tempuhnya akan lebih efisien yang semula 9 jam



Sumber: Antara

menjadi sekitar 4 jam saja.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya dari laman dephub.go.id, yang melanjutkan bahwa wacana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya akan melewati kurang lebih tiga stasiun, yakni paling tidak berhenti di Cirebon dan Semarang.

Selain itu, wacana kereta cepat ke Surabaya ini nantinya akan dihubungkan dengan sejumlah simpul transportasi, seperti Bandara Kertajati sampai angkutan perkotaan seperti MRT dan LRT yang diperkirakan tidak hanya di Jakarta, tetapi akan dibangun di Surabaya dan Bandung.

Terlepas dari wacana rencana pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Budi Karya mengaku masih berfokus menyelesaikan pembangunan KCJB yang akan mulai beroperasi untuk umum Agustus nanti.

Sementara itu, pengamat transportasi Soegijapranata Catholic University (SCU), Djoko Setijowarno, mengaku pesimis wacana proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya bakal terealisasi dalam waktu dekat. Alasannya, mega proyek ini membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit.

Dia memperkirakan, penyelesaian proyek ini membutuhkan waktu kurang lebih 10 tahun. "Wacana itu baru mimpi, kereta cepat itu mahal dan harus punya modal yang cukup besar. Kalau sekarang rasa-rasanya tidak mungkin," kata Djoko dikutip dari Suara Merdeka, Selasa (27/6/2023).

Menurutnya, pemerintah perlu melihat dulu animo masyarakat terhadap kereta cepat Jakarta-Bandung. Terlebih tiket untuk moda transportasi ini diperkirakan berkisar antara Rp 250 ribu- Rp 350 ribu. Djoko justru mempertanyakan alasan publik yang cenderung lebih sering membahas proyek kereta cepat. Padahal, menurutnya persoalan transportasi di Tanah Air lebih pada angkutan umum

di perkotaan dan pedesaan.

"Saya tidak tahu kenapa orang-orang Indonesia berbicara soal proyek ini. Masalahnya itu justru pada angkutan perkotaan dan pedesaan yang mulai punah," ujarnya.

Selain itu, jika wacana tersebut serius direalisasikan, dimungkinkan akan mendatangkan sejumlah problematika. Salah satunya berkaitan dengan pembebasan lahan. "Mengganggu negara lain boleh-boleh saja tetapi harus jelas perjanjiannya. Persewaan mendasarnya saya kira lebih pada pembebasan lahan," ungkapnya. (lut/dya)



Nanti akan berdampak juga pada pembengkakan biaya. Jadi harus dilakukan perencanaan kalau ingin memajukan sampai ke Surabaya,"

**BHIMA YUDHISTIRA**

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios)







# ISMI ARINIAWATI

**Ajak Anak Muda Peduli Lingkungan**

**ISMI** Ariniawati memutuskan untuk mengabdikan diri di kampung halamannya, Jepara, Jawa Tengah.

Sejak tahun 2018, Ismi mendirikan Jepara Green Generation yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan.

Kini, pengabdianannya berlanjut hingga ke tempat lain. Fokusnya hanya satu, membantu masyarakat sekaligus melestarikan lingkungan.

Sebagai pejuang pelestarian lingkungan, Ismi semangat berkarya di mana pun berada.

Sejak pertengahan tahun 2022, Ismi pindah ke Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur, karena mengikuti suaminya bekerja.

Di Ende, dia bertemu dengan Pendiri Kampus Tanpa Dinding Maria Patricia WataBeribeyang sama-sama peduli dengan lingkungan.

"Biasanya banyak kegiatan, ini pindah Ende sampai bosan di rumah terus. Lalu, saya ketemu sama Kampus Tanpa dinding, aku merasa hidup setelah ketemu Kak Iis. Kami mendapat grant dari Women Earth Alliance untuk program pemberdayaan perempuan bidang konservasi kayu manis," kata Ismi mengutip Kompas.

Ismi yang menjadi Manajer Program Kampus Tanpa Dinding bertugas untuk menyusun program perempuan dan agroforestri, dari mulai perencanaan, anggaran, monitoring, dan evaluasi.

Salah satu program yang sedang dikerjakan adalah penanaman kembali pohon kayu manis.

"Di sini parah banget, pohon kayu

manis banyak ditebangi sehingga warga kesulitan air. Masih di bidang lingkungan seperti di Jegeg, tetapi ini agak berbeda," kata Ismi.

Jepara Green Generations (Jegeg) merupakan komunitas yang didirikan Ismi. Meski tidak berada di Jepara, Ismi masih terlibat dalam berbagai kegiatan.

Pada bulan Februari, saat mendapat kesempatan pulang ke Jepara, Ismi bertemu dengan ibu-ibu yang tergabung dalam Kelompok Wanita Tani Desa Menganti, Jepara. Sejak awal tahun ini, Jegeg mempunyai program Jegeg Goes To Village untuk melakukan kampanye lingkungan untuk ibu rumah tangga di desa.

Dalam program itu, anggota Jegeg yang sebagian besar anak muda mengajak ibu-ibu melestarikan lingkungan.

Salah satunya ketika Ismi datang ke desa, membawakan tema sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga menjadi kompos.

Selain itu, juga ada pelatihan membuat produk dari minyak jelantah dan kebunku dapurku yang mengajak ibu-ibu menanam sayuran di halaman rumah. Dari lingkup yang kecil, yaitu rumah tangga, menurut Ismi, diharapkan bisa disebarkan ke lingkungan yang besar.

Untuk itulah, untuk program tersebut Jegeg menggelar kegiatan secara rutin di Desa Menganti. Pelaksanaan program dipercayakan kepada pengurus Jegeg yang rata-rata berusia 18-24 tahun.

Setiap bulan, Ismi memantau kegiatan Jegeg dengan hadir dalam

rapat secara daring. Biasanya, pertemuan daring itu juga dihadiri dua Co-Founder Jegeg, yaitu Kevin Alvianto dan Faris Nur Khulafa.

Banyak hal yang dibahas, terutama

tentang program kerja. Para pengurus yang lebih muda menjalankan program, sedangkan kami yang senior ini mencari dana supaya kegiatan Jegeg masih terus berjalan," katanya.



## TENTANG ISMI ARINIAWATI

### LAHIR:

Jepara, 16 Februari 1996

### PENDIDIKAN:

- S-1 Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro Semarang (Lulus 2015)
- Social Entrepreneurship and Economic Development Short Course, University of Connecticut (2017)

### PENGALAMAN, ANTARA LAIN:

- Pendiri Jepara Green Generation (2018-sekarang)
- Pendiri Kedai IsMe (2017-2022)
- Ketua Proyek TrashTalks Indonesia (Agustus 2017-Januari 2018)
- Ketua YSEALI Women's Alumnae Network Indonesia (2021-2022)
- Manajer Program Kampus Tanpa Dinding (2022-sekarang)





## APAKAH PENDERITA KOLESTEROL BOLEH MAKAN TELUR REBUS?

**KOLESTEROL** merupakan penyakit yang disebabkan bertumpuknya lemak di dalam darah. Salah satu penyebabnya adalah makanan.

Lalu apakah penderita kolesterol boleh makan telur rebus?

Telur adalah sumber protein dan nutrisi lain yang bisa didapatkan dengan harga terjangkau. Namun, makanan sehat yang satu ini juga dicap buruk lantaran kuning telurnya mengandung kolesterol tinggi.

Karena itulah, beberapa orang mengurangi konsumsi telur agar kadar kolesterol dalam tubuh mereka tetap terjaga.

Apalagi bagi orang yang sudah memiliki kolesterol tinggi, telur menjadi salah satu makanan yang di jauhi.

Kandungan protein dalam telur rebus membuatnya jadi pilihan makanan terbaik untuk disantap di pagi hari.

Protein merupakan salah satu sumber energi bagi tubuh, pembentuk otot, serta pendukung program diet.

Proses perebusan dari telur ini pastinya membuat kebanyakan orang berpikiran bahwa telur rebus pastinya akan lebih aman ketimbang telur goreng, karena dari proses penggorengan akan menambah unsur lemak jenuh pada makanan yang berbahaya bagi penderita kolesterol.

Memang benar, bila proses pengolahan makanan memang mempengaruhi kadar kolesterol.

Namun, benarkah telur rebus justru menghasilkan tingkat kolesterol yang lebih sedikit? Ternyata hal tersebut tidaklah benar.

Menurut penelitian yang dilakukan di Laboratorium Biokimia Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang, yang tertulis dalam jurnal bertajuk "Pengaruh Pemberian Berbagai Olahan Telur terhadap Kadar Kolesterol Total Darah Mencit", telur rebus justru memiliki rerata kadar kolesterol tertinggi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, telur rebus memiliki rerata kadar kolesterol total darah 194.50 mg/dl. Sedangkan rerata kadar kolesterol paling rendah adalah telur mentah yang punya rerata kadar total 106.96 mg/dl.

Sedangkan untuk telur goreng memiliki rerata kadar kolesterol 143.53 mg/dl. Lebih rendah ketimbang telur setengah matang yang punya kadar 180.91 mg/dl.

Meski begitu, sebenarnya besarnya kolesterol dalam telur hanya terkandung pada bagian kuningnya, sementara kandungan kolesterol pada bagian putihnya tergolong rendah.

Dilansir dari Alodokter Kemenkes, mengonsumsi telur tidak lebih dari 4-5 butir setiap minggunya masih aman bagi orang yang memiliki kolesterol tinggi.

Karena kadar kolesterol dalam darah tidak begitu dipengaruhi oleh kolesterol yang didapat dari konsumsi telur semata. Jeroan, kulit ayam, daging berlemak, dan junkfood menjadi pemicu terbesar

meningkatnya kadar kolesterol.

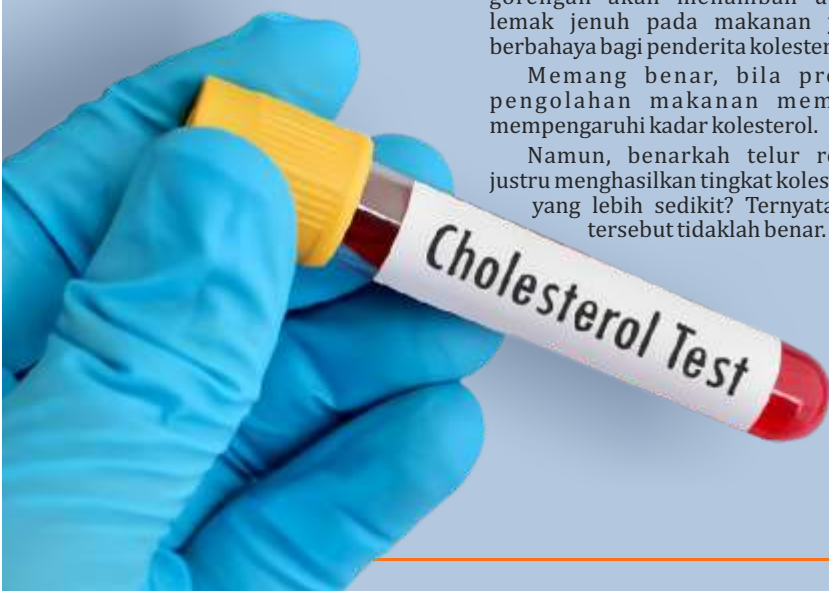
Sehingga mengonsumsi telur memang diperbolehkan bagi penderita kolesterol, mau dengan cara memasak apapun. Asalkan jangan terlalu sering.

Apabila masih khawatir, penderita kolesterol tinggi bisa makan bagian putih telurnya saja yang terbukti rendah kolesterol.

Meskipun telur menyebabkan sedikit peningkatan pada total dan kadar kolesterol jahat, hal itu tidak perlu dikhawatirkan.

Kolesterol yang terkandung dalam telur tidak meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh secara signifikan, seperti yang disebabkan oleh makanan berkolesterol lainnya, seperti yang mengandung lemak trans dan lemak jenuh.

Jadi, meskipun mengandung kolesterol tinggi, telur boleh dikonsumsi (berbagai sumber)





# MENGENAL FITUR TRAVEL MODE APPLE VISION PRO

**HEADSET** Augmented Reality (AR) Apple Vision Pro memiliki fitur yang tak diumumkan dalam sesi perkenalan yakni Travel Mode.

Vision Pro, headset AR/VR keluaran Apple ini dilengkapi dengan beragam fitur canggih yang dapat memanjakan penggunanya.

Salah satunya adalah fitur Travel Mode, fitur yang disiapkan Apple untuk pengguna Vision Pro yang gemar bepergian.

Fitur Travel Mode tak disampaikan saat pengenalan Apple Vision Pro dalam konferensi pengembang tahunan Worldwide Developers Conference (WWDC) pada 5 Juni lalu.

Namun fitur ini dibocorkan oleh Software Development Kit (SDK) visionOS yang mengembangkan sistem operasi di Apple Vision Pro.

"Jika Anda berada di pesawat, Anda harus tetap mengaktifkan Travel Mode agar bisa terus memakai Apple Vision Pro," bunyi keterangan di SDK visionOS.

Ada beberapa penyesuaian yang terjadi saat pengguna mengaktifkan Travel Mode. Hal ini disebabkan keterbatasan ruang dan gerakan yang bisa dilakukan di pesawat atau alat transportasi lainnya.

Fitur Awareness dinonaktifkan saat pengguna berada dalam Travel Mode. Sensor dan fitur yang berdasarkan pada kesadaran spasial juga akan dimatikan.

Alasannya, jarak antarpemungup yang sempit di pesawat menimbulkan potensi anomali pada Vision Pro. Gawai ini bakal kesulitan untuk membedakan dunia nyata dan virtual.

Selain itu, Persona Digital juga akan dinonaktifkan dalam Travel Mode. Pengguna tidak bisa memakai avatar atau representasi digital lainnya.

Hal ini disebut berkaitan dengan Awareness yang dimatikan, sehingga bakal memengaruhi akurasi persona digital.

Yang terakhir adalah akurasi tatapan dalam Travel Mode bakal berkurang. Alasannya juga karena posisi duduk yang berdempetan sehingga perangkat akan kesulitan melacak tatapan pengguna.

Untuk mencegah malfungsi karena posisi duduk tadi, visionOS akhirnya memilih mengurangi akurasi tatapan di Travel Mode Apple Vision Pro.

Travel Mode, dirancang khusus untuk meningkatkan pengalaman pengguna saat bepergian menggunakan pesawat.

Ruang tertutup dan faktor lingkungan yang unik dalam kabin pesawat menjadi tantangan bagi perangkat VR.

Travel Mode dalam Vision Pro untuk memastikan pengalaman yang lebih lancar.

Tentang Travel Mode Apple Vision Pro Beberapa bocoran mengisyaratkan fungsi fitur baru itu telah ditemukan dalam beta pengembang pertama

untuk visionOS.

Bocoran itu menunjukkan, Travel Mode dirancang untuk mengadaptasi fungsi Apple Vision Pro untuk menangani ruang tertutup seperti kabin pesawat.

Sensor dan fitur tertentu yang bergantung kesadaran spasial dapat dimatikan atau diperkecil saat menggunakan Travel Mode di Vision Pro.

Berbagai fitur itu menjadi tidak akurat di dalam pesawat yang ruangnya terbatas dan pengguna berada sangat dekat dengan penumpang lain.

Travel Mode akan menonaktifkan atau membatasi fitur ini untuk memastikan pengguna tidak mengalami pengalaman VR yang terganggu.

Travel Mode juga bisa menonaktifkan Digital Persona atau avatar yang akan tersedia di Vision Pro selama FaceTime.

Saat ini, Travel Mode masih dalam versi beta dan lebih banyak fitur yang akan ditambahkan saat headset tersedia untuk umum (berbagai sumber)



HARIAN  
**LENTERA**  
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"

PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI

OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)

PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)

PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)

REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)

**MEDIA TERVERIFIKASI**



**BIRO:** SURABAYA: LUTFI YUHANDI | MOJOKERTO: RAHMAD SURYADI | GRESIK-LAMONGAN: ASEPTA YOGA P (ID SERTIFIKASI 3189) | KEDIRI-JOMBANG-NGANJUK: GATOT SUNARKO | TAPAL KUDA (PASURUAN-PROBOLINGGO BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI): IMAN SANTOSO, | MADIUN: IMAM GHOZALI (ID SERTIFIKASI 11563), | BLITAR: ARIEF SUKAPUTRA | TRENGGALEK: ANGGA PRAYOGA

**PENASEHAT HUKUM** DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO | **SEKERTARIS** ISTIDHA NUR AMANAH,

**DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN, KIKI AMALIA GUYEN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal ke wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal ke wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

# ENAM PENYEBAB RISIKO SERANGAN JANTUNG DI USIA MUDA

**PENYAKIT** serangan jantung umumnya dikaitkan dengan orang-orang yang telah lanjut usia, namun, sebenarnya risiko penyakit tersebut juga dapat mengancam segala umur termasuk di usia muda seperti umur 20-an atau 30-an.

Menurut Medical Daily, diperkirakan satu dari setiap lima kasus serangan jantung terjadi pada individu di bawah usia 40 tahun karena faktor risiko yang dapat memicu serangan jantung seperti diabetes dan hipertensi.

Setidaknya terdapat enam faktor risiko yang dapat memicu penyakit serangan jantung di usia muda.

## 1. Diabetes

Penderita diabetes memiliki risikodua hingga empat kali lebih besar mengalami serangan jantung pada usia muda dibandingkan orang tanpa diabetes.

Kadar gula darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan penumpukan plak di arteri yang menyebabkan aterosklerosis.

## 2. Hipertensi

Tekanan darah tinggi atau hipertensi merupakan cikal bakal penyakit jantung karena menyebabkan penebalan otot jantung dan merusak pembuluh darah.

Insiden hipertensi meningkat lebih cepat pada orang dewasa usia muda dibandingkan pada orang dewasa yang telah lanjut usia.

## 3. Obesitas

Menurut sebuah studi tahun 2018, dengan setiap unit BMI (indikator penentu berat badan) tambahan, risiko tekanan darah tinggi turut meningkat yang dapat memicu risiko serangan jantung.

Lebih dari satu dari tiga orang Amerika Serikat mengalami obesitas dan prevalensi obesitas sekitar 40 persen pada orang dewasa berusia 20 hingga 39 tahun.

## 4. Stres

Stres dapat meningkatkan peradangan, tekanan darah, dan menurunkan kadar kolesterol baik dalam tubuh. Seseorang yang mengalami stres cenderung memiliki pola makan, tidur, dan olahraga yang tidak teratur.

Masalah pekerjaan dan hubungan juga bisa memicu stres pada orang dewasa usia muda.

## 5. Merokok

Penelitian telah menunjukkan bahwa perokok memiliki risiko kematian akibat penyakit jantung tiga kali lipat dibandingkan dengan bukan perokok. Usia seseorang mulai merokok juga memengaruhi tingkat risikonya.

Perokok yang memulai kebiasaannya sejak dini berisiko lebih tinggi mengalami kematian akibat serangan jantung.

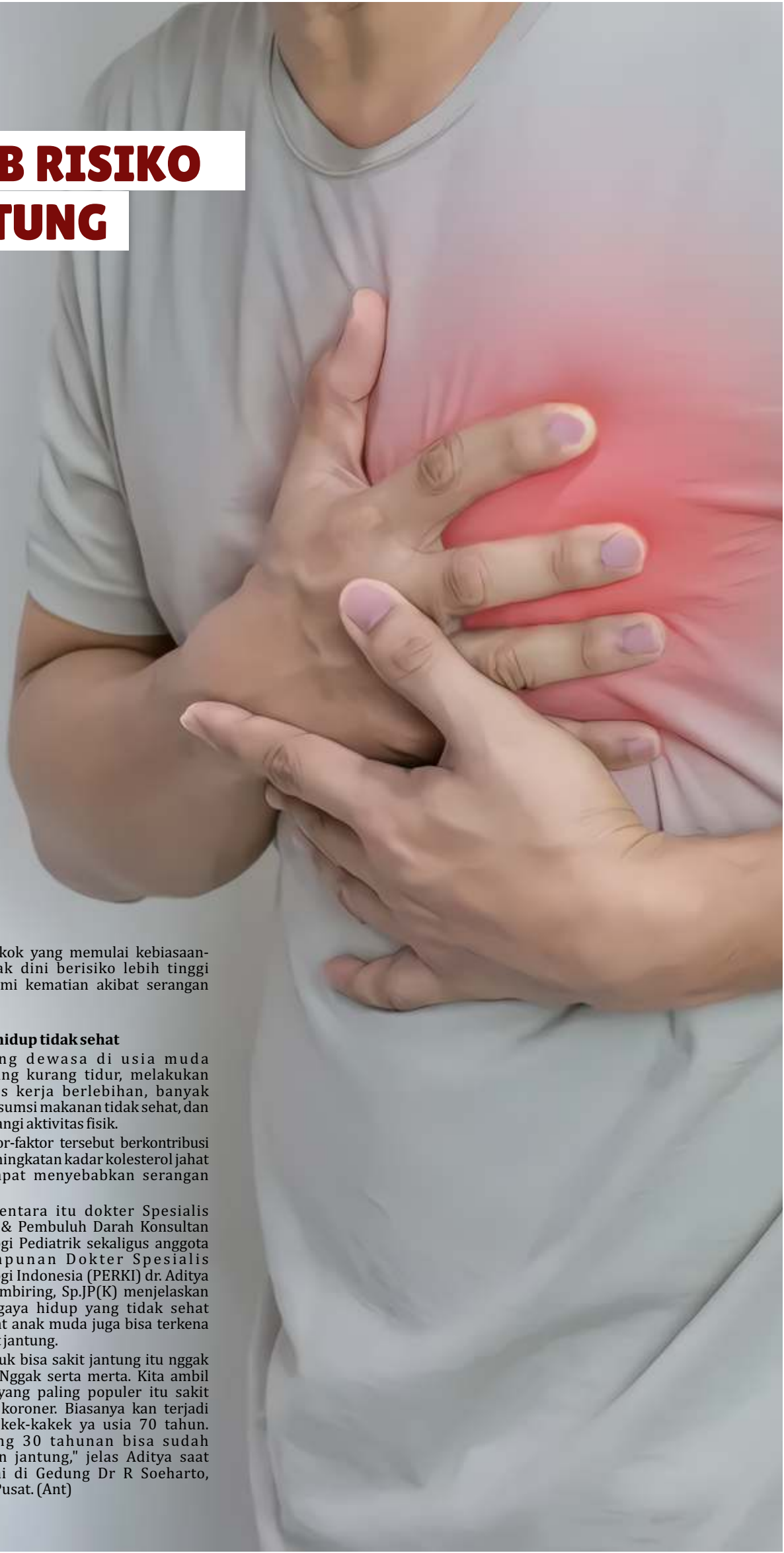
## 6. Gaya hidup tidak sehat

Orang dewasa di usia muda cenderung kurang tidur, melakukan rutinitas kerja berlebihan, banyak mengonsumsi makanan tidak sehat, dan mengurangi aktivitas fisik.

Faktor-faktor tersebut berkontribusi pada peningkatan kadar kolesterol jahat yang dapat menyebabkan serangan jantung.

Sementara itu dokter Spesialis Jantung & Pembuluh Darah Konsultan Kardiologi Pediatrik sekaligus anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiologi Indonesia (PERKI) dr. Aditya Agita Sembiring, Sp.JP(K) menjelaskan bahwa gaya hidup yang tidak sehat membuat anak muda juga bisa terkena penyakit jantung.

"Untuk bisa sakit jantung itu nggak mudah. Nggak serta merta. Kita ambil contoh yang paling populer itu sakit jantung koroner. Biasanya kan terjadi pada kakek-kakek ya usia 70 tahun. Sekarang 30 tahunan bisa sudah serangan jantung," jelas Aditya saat dijumpai di Gedung Dr R Soeharto, Jakarta Pusat. (Ant)





**Duh! Rp 4 M untuk ... (dari hal 1)**

**BERBAGAI** fakta-fakta mengejutkan terungkap dalam sidang Eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate. Dia disebut menerima uang Rp 4 miliar dari Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan pada tahun 2022. Adapun Plate dan Irwan merupakan dua terdakwa dugaan korupsi proyek penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo.

"Terdakwa Johnny Gerard Plate sekitar tahun 2022 menerima uang sebanyak empat kali dengan total keseluruhan Rp 4 miliar dari Irwan Hermawan," ujar jaksa saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (27/6/2023). Jaksa menyebut dari total uang Rp 4 miliar, masing-masing diterima Plate sebesar Rp 1 miliar yang dibungkus kardus.

Irwan disebut mengirimkan uang melalui seseorang bernama Winda Purnama kepada Welbertus Natalius Wisang. Selanjutnya, Welbertus Natalius Wisang menyerahkan uang tersebut kepada Plate. Sebanyak tiga kali uang diterima di ruang tamu rumah pribadi Plate yang berlokasi di Jalan Bongo 1, Cilandak, Jakarta Selatan. "Dan satu kali di ruang kerja terdakwa Johnny Gerard Plate di Kantor Kemkominfo," kata jaksa.

Dalam perkara ini, Johnny menjalani sidang bersama Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Achmad Latif dan Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020, Yohan Suryanto.

Ketiganya merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2020-2022. Selain ketiganya, ada juga tiga terdakwa lain yang bakal menyusul menjalani sidang perdana pada pekan berikutnya. Mereka adalah Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak; Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali, Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan.

Surat dakwaan juga menyatakan, Menkominfo Johnny Plate meminta uang bulanan sebesar Rp 500 juta dari Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Anang Achmad Latif. Johnny G Plate menerima uang dari Anang antara Maret 2021 hingga Oktober 2022.

"Terdakwa Johnny G Plate menerima uang Rp 500 juta per bulan sebanyak 20 kali mulai bulan Maret 2021 hingga Oktober 2022," kata jaksa.

Uang setoran bulanan itu berasal dari perusahaan konsorsium penyedia jasa pekerjaan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Aliran uang Rp 500 juta per bulan itu merupakan permintaan Johnny G

Plate kepada Anang.

Saat itu, Anang menghadap Johnny di ruang kerja Menkominfo di lantai 7 kantor Kementerian Kominfo. Johnny menyebut, uang itu akan diperlukan untuk kepentingan anak-anak kantor.

"Soal dana operasional tim pendukung Menteri sebesar 500 juta setiap bulan untuk anak-anak kantor. Nanti Heppy akan ngomong sama kamu," ujar Johnny, sebagaimana dibacakan jaksa penuntut umum dalam persidangan.

Dalam perkara korupsi BTS Kominfo sendiri, Johnny G Plate telah didakwa Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Disebut untuk Banjir hingga Gereja**

Plate disebut menggunakan uang korupsi BTS Kominfo untuk sejumlah hal. Termasuk memberikan bantuan kepada korban banjir bandang di Flores, NTT, pada 2021 silam. Dalam dakwaan jaksa, Johnny meminta kepada Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo, Anang Achmad Latif, untuk mengirimkan sejumlah uang bantuan tersebut. Uang tersebut diduga terkait dengan proyek BTS yang tengah dikerjakan. Tak disebutkan dari mana sumbernya, apakah dari anggaran proyek atau konsorsium terkait.

"Terdakwa Johnny Gerard Plate memerintahkan Anang Achmad Latif agar mengirimkan uang untuk kepentingan Terdakwa Johnny Gerard Plate," kata jaksa. "Pada April 2021, sebesar Rp 200.000.000 kepada korban bencana banjir di Kabupaten Flores Timur," sambung dia.

Diketahui, Flores Timur diterjang banjir bandang pada Minggu (4/4/2021). Banjir tersebut menerjang beberapa kabupaten dan kota di NTT. Selain Flores Timur, ada juga Kupang, Flores, Malaka, Lembata, Rote Ndao, Ende, Sikka, Sabu Raijua hingga Alor. Ratusan orang meninggal akibat bencana tersebut.

Bendera Merah Putih berkibar di antara rumah-rumah yang hancur akibat banjir bandang di Desa Weiburak, Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Selain itu, Plate juga meminta kepada Anang Achmad untuk mengirimkan sejumlah uang lainnya, termasuk ke gereja.

Selain uang मिलiran dari Anang Achmad ini, Plate juga didakwa menerima sejumlah penerimaan uang lain dan fasilitas dari korupsi proyek BTS Kominfo. Totalnya mencapai Rp 17.848.308.000. Adapun kerugian negara dalam korupsi BTS Kominfo ini mencapai Rp 8 triliun rupiah. Sebab, pengerjaan proyek BTS Kominfo ini bermasalah, bahkan sejak perencanaan.

Johnny G Plate mengaku tidak

pernah melakukan dugaan korupsi sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung). Hal itu disampaikan Johnny saat Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri menanyakan pemahamannya atas dakwaan yang dibacakan oleh jaksa.

"Apakah saudara mengerti?" tanya Hakim Fahzal dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (27/6/2023). Johnny pun mengaku mengerti, tetapi ia menyatakan tidak pernah melakukan tindakan yang didakwakan oleh jaksa. "Saya mengerti, Yang Mulia, tapi saya tidak melakukan apa yang didakwakan," kata Johnny. "Nanti saya akan buktikan!" ucapnya melanjutkan.

**Nasdem Bicara soal Pengganti**

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengantongi nama Menkominfo pengganti Johnny G Plate. NasDem tak masalah pengganti Johnny bukan dari kadernya. "Itu persoalan pengganti Johnny Plate persoalan Presiden, NasDem tidak bermain di ruang itu," kata Waketum NasDem Ahmad Ali.

Ali menuturkan NasDem tidak menyodorkan nama pengganti Johnny ke Jokowi. Dia menyebut pemilihan menteri sepenuhnya kewenangan Jokowi. "Sejauh ini NasDem tidak akan menyodorkan nama. Lagi pula kewenangan dari Bapak Presiden," ujarnya.

Lebih lanjut, Ali menegaskan sampai saat ini NasDem masih mendukung pemerintahan Jokowi. Ada atau tidak ada menteri dari NasDem bukan menjadi syarat dukungan. "Itu kan hak Presiden, apa urusan NasDem. Kita mendukung Jokowi itu kita pegang ya, ada menteri tidak ada menteri itu bukan syarat. Ya nggak ada masalah, bukan punya kita itu, punya Presiden," imbuhnya.

Jokowi sebelumnya bicara soal

kursi Menkominfo yang kosong usai Johnny G Plate ditahan Kejaksaan Agung buntut kasus dugaan korupsi proyek BTS BAKTI. Jokowi mengaku sudah mengantongi nama pengganti Johnny. "Udah, tapi nunggu," kata Jokowi di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Senin (26/6/2023).

Jokowi mengatakan perombakan kabinet atau reshuffle segera dilakukan. Dia mengatakan reshuffle kabinet menunggu hari yang baik. "Belum belum. Nanti kalau sudah waktunya akan segera diselesaikan," ujarnya. "Nunggu hari," imbuh Jokowi.

Seperti diketahui, jabatan definitif Menkominfo masih kosong usai politikus Partai NasDem Johnny G Plate ditetapkan tersangka dan ditahan dalam kasus korupsi proyek BTS BAKTI. Jokowi menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Menkominfo setelah Johnny G Plate menjadi tersangka. Pejabat yang ditunjuk menjadi Plt yaitu Menko Polhukam Mahfud Md.

Diketahui, tak ada satu pun politisi Partai Nasdem yang hadir dalam sidang perdana Plate di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim menyatakan bakal hadir dalam persidangan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate pekan depan.

Ia mengatakan bahwa sikap Partai Nasdem tetap mendukung Johnny dan berpegang pada asas praduga tak bersalah. "Oh tetap kita memberi dukungan, sidang minggu depan saya hadir langsung," ujar Taslim.

Menurutnya, yang mestinya datang dalam persidangan Johnny G Plate adalah dirinya atau Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari (Tobas). Namun, keduanya tak bisa menghadiri sidang kali ini karena ada agenda lain. "Kakak Tobas lagi naik haji. Saya sejak Kamis keliling Sulawesi sama ketua umum. Sekarang lagi acara di Bali," imbuh dia. (wid,rls,ant,kum/dya)

**12 PERBUATAN 'KORUP' PLATE SESUAI DAKWAAN JAKSA:**

*Lanjutan dari hal 1...*

**6. Kontrak kritis**

Jaksa menyebut Plate mengetahui dan sadar proyek BTS 4 dalam perjalanannya mengalami kontrak kritis karena mengalami keterlambatan atau deviasi minus rata-rata 40 Namun, Plate justru tetap memaksakan supaya dilakukan pembayaran 100 persen terhadap proyek ini dengan jaminan bank garansi dan memberikan perpanjangan pekerjaan sampai 31 Maret 2022.

**7. Lanjutkan pekerjaan**

Pada Maret 2022, diketahui pengerjaan proyek ini belum rampung. Namun, Plate meminta Achmad Latif untuk tetap melanjutkan pekerjaan. Padahal waktu pemberian kesempatan telah berakhir.

**8. Fasilitas Rp 420 juta**

Jaksa mengatakan bahwa selama kurun 2021-2022, Plate mendapatkan fasilitas dari Galumbang Menak berupa pembayaran bermain golf sebanyak enam kali, yaitu kurang lebih sebesar Rp 420 juta.

**9. Kirim uang**

Jaksa juga mengatakan bahwa Plate memerintahkan Achmad Latif mengirimkan uang untuk kepentingan pribadinya. Permintaan Plate langsung disanggupi Achmad Latif. Permintaan itu antara lain, Rp 200 juta kepada korban bencana banjir di Kabupaten Flores Timur pada April 2021 dan Rp 250 juta kepada Gereja GMIT di Nusa Tenggara Timur pada Juni 2021. Kemudian, Rp 500 juta kepada Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus pada Maret 2022 dan Rp 1 miliar kepada Keuskupan Dioses Kupang di bulan yang sama.

**10. Terima Rp 4 miliar**

Pada 2022, Plate disebut menerima sebanyak empat kali dengan total keseluruhan Rp 4 miliar dari Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan. Jaksa menyebut dari total uang Rp 4 miliar, masing-masing diterima Plate sebesar Rp 1 miliar yang dibungkus kardus

**11. Fasilitas di Barcelona**

Pada tahun 2022, Plate mendapatkan fasilitas dari Direktur Utama PT Sansaine Exindo Jemy Sutjiawan. Fasilitas ini berupa sebagian pembayaran hotel bersama tim selama melakukan perjalanan dinas ke Barcelona, Spanyol, sebesar Rp 452,5 juta.

**12. Fasilitas di Paris, London, dan AS**

Pada tahun 2022, Plate juga mendapatkan fasilitas dari Irwan Hermawan berupa sebagian pembayaran hotel bersama tim selama melakukan perjalanan ke Paris, Prancis, sebesar Rp 453,6



# DPRD JATIM BERI REKOMENDASI PEMPROV

**SURABAYA** – Komisi-komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur memberikan berbagai rekomendasi pada Pemprov Jatim sesuai bidang mereka masing-masing. Rekomendasi tersebut seiring dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dalam rapat paripurna, Selasa (27/6/2023).

Mulai dari Komisi A, melalui juru bicaranya Ratnadi Ismaon mengatakan bahwa telah melakukan rapat kerja dengan 25 OPD yang menjadi mitra. Dari rapat tersebut akhirnya menghasilkan beberapa rekomendasi, salah satunya adalah pada Biro Hukum.

Dari sisi anggaran, Biro Hukum mendapatkan pagu Rp 23,887 miliar. "Secara umum pelaksanaan program/kegiatan telah memenuhi target yang telah ditetapkan, namun ada dua indikator yang belum sesuai prediksi pencapaian," tandasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, dua indikator tersebut yaitu; pertama, pada program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator persentase realisasi anggaran biro hukum dengan target 93% pencapaian target 88,11%. Hal tersebut di karenakan belanja pegawai tidak terealisasi sepenuhnya di karenakan adanya pegawai yang pensiun dan meninggal dunia.

"Kedua, pada program Fasilitasi dan Kordinasi Hukum dengan persentase perkara hukum dan HAM di Jawa Timur telah diputus dengan target 40% pencapaian target 32%, hal tersebut dikarenakan lokasi, jumlah dan tahapan persidangan di Pengadilan tergantung dari pihak eksternal, Pemohon dan Pengadilan," tandasnya.

Untuk itu, Komisi A merekomendasikan segera terkait evaluasi terhadap Perda – Perda yang perlu ditindaklanjuti yang belum ada Pergusnya. Selain itu komisi A juga berharap agar tugas dan fungsi biro hokum dapat terlaksana dengan baik apabila didukung dengan anggaran yang cukup.

Kemudian, komisi B melalui juru bicaranya Daniel Rohi juga memberikan beberapa rekomendasi. Diantaranya adalah merekomendasikan supaya total anggaran OPD mitra komisi B minimal 10% dari APBD Jawa Timur. Tentunya dengan memperhatikan proporsi anggaran maksimal 40% untuk anggaran Belanja Operasi.

"Usulan ini dengan asumsi bahwa

APBD Jatim tahun 2023 sebesar Rp. 31.120.677.901.940. Usulan kenaikan total adalah sebesar Rp. 3.112.067.790.194 atau 10% dari total APBD Jawa Timur. Pengusulan ini sudah kami lakukan bertahun-tahun, tapi tidak pernah direspon secara konkrit, hanya dijadikan catatan semata," tandas Daniel.

Dia menandakan pengusulan kenaikan anggaran ini sangat rasional. Dari aspek sumbangan terhadap PRDB dan kinerja yang ditunjukkan oleh OPD yang menempatkan Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional dengan kontribusi surplus gabah mencapai 3 juta ton, gula 1,1 juta ton, ternak, susu dan berbagai komoditas lainnya. Namun dari alokasi anggaran masih belum mengalami kenaikan selama 3 tahun berturut-turut.

Data menunjukkan, lanjutnya, bahwa pada tahun 2020 dari sembilan mitra kerja komisi B, tercatat total belanja Rp 1.098.759.000.000 lebih atau sekitar 3,18 persen dari total belanja daerah pada APBD 2020, Rp 34.565.28.000.000 lebih. Tahun 2021 total angrgan pada kisaran Rp 1,6 triliun dari total belanja daerah atau R APBD Jatim 2021 yaitu sebesar Rp 32 triliun lebih

"Dan tahun 2022 sebesar Rp 1,4 triliun dari sekitar Rp 31 triliun total APBD Jawa Timur, dengan prosentasi pada kisaran 3,18 % - 5,0%. Berdasarkan kondisi ini, jika ingin perekonomian Jawa Timur mengalami kenaikan signifikan dan itu akan berdampak pada Indikator Kinerja Utama seperti Pertumbuhan Ekonomi, Penurunan Angka Kemiskinan, dan Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), maka harus ada kenaikan anggaran," tegasnya.

Komisi C, melalui juru bicaranya, Lilik Hendarwati mengungkapkan salah satu rekomendasinya yaitu terkait dengan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Di mana, Komisi C meminta kepada Biro Perekonomian untuk melakukan evaluasi atas kinerja BUMD yang tidak bisa menjalankan peran dan fungsinya sebagai penggerak perekonomian maupun sumber PAD.

"Menurut hemat Komisi C perlu ditinjau ulang keberadaan BUMD yang tidak produktif dan tidak prospektif khususnya pada anak perusahaan. Kalau memang sudah tidak bisa dioptimalkan maka dipandang perlu untuk dimergers dengan BUMD lain ataupun dilikuidasi," tegasnya.

Kemudian, Komisi C juga memberikan apresiasi terhadap



Juru bicara Komisi B DPRD Jatim, Daniel Rohi saat menyampaikan rekomendasi pada Pemprov Jatim atas Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 dalam rapat paripurna, Selasa (27/6/2023)

BUMD yang sudah memenuhi target pada kinerja tahun 2021. Komisi C berharap semangat ini terus dijaga di tahun-tahun yang akan datang dan meningkat secara signifikan.

"Selanjutnya, Komisi C memberikan catatan khusus pada PT. JGU yang tidak mampu membayarkan deviden tahun kinerja 2021 yang ditargetkan di APBD di tahun 2022. Hendaknya Pemerintah Provinsi Jawa Timur lebih pro aktif terhadap persoalan ini dengan memperhatikan kaidah terhadap pengelolaan keuangan daerah," sambung Lilik.

Sementara, Komisi D dengan juru bicara Hadi Dediansyah menyoroti tentang aagu anggaran Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda). Di mana dalam Perubahan APBD 2022 sebesar Rp 155,237 miliar yang naik sebesar 3,9 % lebih dibanding APBD 2022 murni. Serapan anggaran mencapai 94,43 %, atau setara Rp 146,775 miliar. Masih terdapat Silpa sebesar Rp 8,461 miliar.

"Terhadap kinerja anggaran Bappeda Provinsi Jawa Timur tahun 2022, kami rekomendasikan beberapa hal; pertama, mengaggas, dan mengevaluasi program perencanaan pembangunan yang tergolong inovatif. Misalnya, mengevaluasi Puspa Agro. Serta perencanaan destinasi wisata level internasional," katanya.

Kedua, sebagai OPD dengan produk berupa dokumen, Bappeda harus meningkatkan sinergitas dengan Bappeda Kabupaten dan Kota, terutama untuk menjejaki berbagai hibah infrastruktur, hibah sosial, dan transfer anggaran kepada Kabupaten dan kota; ketiga, sebagai "simpul" kebijakan perangkaan, Bappeda wajib memiliki data yang update dari berbagai OPD. Perangkaan seluruh OPD harus berdasar kebutuhan riil. Bukan sekadar copy-paste tahun kemarin ditambah sedikit perubahan.

Hadi melanjutkan, berkaitan dengan laporan hasil pemeriksaan BPK yang telah memberi opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) delapan kali berturut-turut, Komisi D menilai sebagai suatu pencapaian yang luar biasa.

"Karena itu, Komisi D patut memberikan apresiasi dan perhatian seksama terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, sekaligus sebagai pelaksanaan fungsi budgeting dan fungsi pengawasan yang dimandatkan oleh konstitusi," tandasnya.

Sedangkan, terhadap OPD yang masih memperoleh catatan oleh BPK, Komisi D merekomendasikan, wajib hukumnya untuk memperbaiki dan menelusuri kesalahan dalam arus kas daerah. "Perbaikan wajib dilakukan karena akan menjadi beban verifikasi keuangan pada APBD tahun berikutnya. BPK akan selalu menagih perbaikan yang sekaligus dijadikan catatan tunggakan," paparnya.

Sedangkan Komisi E juga memberikan beberapa rekomendasi, salah satunya adalah terkait pendidikan. Juru bicara Siti Mukiyarti mengatakan bahwa komisi E merekomendasikan kepada Pemprov Jatim untuk mengoptimalkan pemerataan mutu Pendidikan dengan memberikan dukungan peningkatan sarana prasarana dan peningkatan kompetensi SDM, terutama terhadap satuan Pendidikan swasta serta yang terletak di daerah pedesaan dan kepulauan.

"Selain itu, Komisi E juga mendukung gagasan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk memberikan Bantuan Biaya Manajemen Operasional Minimal Sekolah dalam rangka mempercepat pemerataan mutu Pendidikan di Provinsi Jawa Timur," katanya. (lut/dya/adv)